

UPAYA AKSESI SWEDIA KE *THE NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION* (NATO)

Ulya Zahra Hanafi Putri¹

Abstract: Russia's aggression into Ukraine in February 2022 marked a fundamental change in Sweden's security condition. It resulted in a shift of Sweden's perception towards Russia as a dangerous threat to be considered. In response, Sweden needs to updated its security policy to be preventive of any threats to Sweden, and consider the risks of a prolonged and escalating Russia-Ukraine war. So that Sweden's national security needs and interests can be fulfilled. Therefore, Sweden decided to join NATO membership with the aim that security guarantees could be achieved through the collective defense principle of NATO Article 5. However, Sweden's accession process was blocked by two NATO member states, Turkey and Hungary because of their rejection of Sweden's accession proposal to NATO. Because of that, this research aims to find out what efforts and steps were taken by Sweden in order to join The North Atlantic Treaty Organization (NATO). This research uses descriptive research methods with qualitative data analysis techniques. In helping to explain the problem of this research, the theory of securitization by Barry Buzan is used. Then to give a help for answer the research problem, the integrative negotiation concept by Thomas F. Burchill is also used. The results showed that in its accession efforts to NATO, Sweden has carried out three steps of integrative negotiation methods, firstly Sweden started with discussions and identification of problems between Sweden and Turkey and Hungary. After that, Sweden together with Turkey and Hungary tried to find out solutions that could solve the problem and fulfill the interests of each party. The solution was in the form of the Trilateral Memorandum agreed by Sweden and Turkey, as well as the provision of meetings and mediation by Sweden and Hungary.

Keywords: Sweden, Accession, NATO, Trilateral Memorandum, Turkey and Hungary.

Pendahuluan

Swedia merupakan salah satu mitra penting dari aliansi militer *The North Atlantic Treaty Organization* (NATO), karena peran serta kontribusinya yang besar dan aktif dalam setiap kegiatan dan kerja sama dengan NATO. Hubungan yang dibangun oleh kedua belah pihak ini sudah berlangsung sejak hampir 30 tahun, dengan fokus kerja sama dalam hal operasi perdamaian, latihan bersama, analisis dan diskusi pertahanan keamanan, serta pertukaran informasi (*North Atlantic Treaty Organization*, 2023). Hubungan kemitraan NATO dan Swedia dimulai sejak tahun 1994 ketika Swedia bergabung dalam *Partnership for Peace* (PfP), dan sejak saat itu hubungan baik antara Swedia dan NATO terus ditingkatkan (*Government Offices of Sweden*, 2023). Kerja sama di antara kedua belah pihak yang telah berlangsung sejak lama ini, secara historis didasarkan pada kebijakan non-blok militer oleh Swedia, sehingga tidak membuat Swedia menjadi anggota formal dari pakta pertahanan ini.

Ketika agresi militer kembali dilancarkan oleh Rusia kepada Ukraina pada 24 Februari 2022, Swedia kembali meningkatkan hubungan kemitraan nya dengan NATO melalui *Modalities for Strengthened Interaction* (MSI) yang berfokus pada peningkatan

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail: ulyazahra13@gmail.com.

pertukaran informasi dan komunikasi strategis terkait dengan situasi krisis akibat agresi militer Rusia (*Government Offices of Sweden, 2023*), peningkatan kerja sama ini sebagai respon tindakan Swedia atas krisis yang sedang terjadi. Sehari setelah agresi, tepatnya pada 25 Februari 2022 dalam sebuah konferensi pers Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson menyatakan bahwa serangan yang dilakukan Rusia bukan hanya serangan kepada Ukraina namun juga terhadap seluruh tatanan keamanan Eropa dan hak negara-negara demokratis untuk memilih jalan mereka sendiri (Jonsson, 2022), lalu sebulan setelahnya pada tanggal 16 Maret, Andersson kembali menyampaikan bahwa kondisi Swedia telah berubah secara fundamental akibat perang Rusia-Ukraina, sehingga perlu mempertimbangkan semua opsi yang ada termasuk keanggotaan Swedia di NATO (Davidsson, 2022). Oleh sebab itu, dibentuklah kelompok kerja lintas partai untuk membahas lingkungan keamanan dunia yang berubah, yang menghasilkan laporan hasil diskusi kebijakan keamanan yakni *Report: Deterioration of the security for Sweden* (*Government Offices of Sweden, 2023*).

Berdasarkan laporan keamanan ini, terdapat analisis faktor yang membuat Swedia merasa keamanan negaranya tidak aman dan terancam akibat tindakan Rusia di Ukraina. Faktor tersebut dimulai dengan adanya perubahan persepsi ancaman oleh Swedia kepada Rusia yang dinilai semakin agresif dan totaliter, di dalam laporan keamanan disampaikan bahwa invasi Rusia ke Ukraina menjadi agresi militer paling besar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia tanpa ragu melancarkan serangan yang dinilai sebagai pelanggaran hukum internasional dan kejahatan perang (*Government Offices of Sweden, 2022*), ditambah lagi dengan adanya risiko bahwa perang di Ukraina akan berkepanjangan dan dapat terjadi peningkatan kekuatan. Eskalasi ini selanjutnya dapat menyebabkan serangan terhadap negara lain atau penggunaan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal lainnya oleh Rusia (*The Defence Commission's Secretariat, 2023*).

Hal tersebut menyebabkan Swedia perlu mencari jaminan keamanan bagi negaranya. Meskipun Swedia sebelumnya telah menjadi anggota EOP dan telah tergabung dalam MSI NATO yang berguna dalam hal pertukaran informasi terkait krisis Rusia-Ukraina, namun kerja sama tersebut dinilai kurang dan terbatas. Hal ini dikarenakan Swedia yang tidak tergabung kedalam keanggotaan resmi NATO, sehingga tidak menjadi bagian dari negara anggota yang dijamin keamanannya oleh prinsip pertahanan kolektif NATO (*Government Offices of Sweden, 2022*). Maka dari itu demi melindungi keamanan dan kedaulatan negaranya, Swedia pada akhirnya memutuskan untuk bergabung pada aliansi *The North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dengan tujuan agar Swedia menjadi bagian dari keamanan kolektif NATO sesuai dengan Pasal 5 dari *The North Atlantic Treaty*, yang memberikan keuntungan berupa terjaminnya keamanan negara Swedia secara penuh karena adanya kepastian bantuan dari seluruh negara anggota NATO apabila Swedia mengalami serangan bersenjata (*Government Offices of Sweden, 2023*). Tercatat pada 18 Mei 2022 Swedia secara resmi mengajukan surat permohonan untuk bergabung dengan NATO.

Namun, ternyata upaya Swedia dalam proses bergabungnya ke NATO tidak berjalan lancar. Meskipun dianggap memenuhi semua langkah dan syarat yang harus dilakukan sesuai prosedur, yakni telah mengirimkan surat permohonan keanggotaan, menjadi negara yang diundang, melakukan pembicaraan akses, serta menyerahkan *letter of intent* dan dilanjutkan dengan penandatanganan proposal akses oleh Sekutu NATO. Swedia justru mengalami hambatan pada tahap selanjutnya dari dua negara anggota NATO, yaitu Turki dan Hongaria melalui sikap kedua negara yang sempat

menolak untuk meratifikasi proposal aksesinya ke NATO. Mengakibatkan Swedia akhirnya harus berupaya sedemikian rupa agar Turki dan Hongaria merubah keputusannya untuk menyetujui proposal aksesinya tersebut.

Penolakan kedua negara memberatkan upaya Swedia karena aturan dalam keanggotaan NATO, yakni *The Washington Treaty* pada Pasal 10 menyebutkan bahwa semua negara anggota harus menyetujui dan meratifikasi proposal aksesinya suatu negara yang ingin bergabung ke dalam NATO terlebih dahulu, tanpa ada satupun pihak yang menolak. Karena adanya penolakan Turki dan Hongaria dalam *unanimous vote* terhadap keanggotaan Swedia di NATO, menyebabkan Swedia berupaya untuk melakukan berbagai cara agar dapat bergabung dengan *The North Atlantic Treaty Organization* (NATO) di tengah berbagai hambatan yang dihadapinya.

Kerangka Teori

Teori Sekuritisasi

Dalam membantu menjelaskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde di dalam buku mereka yang berjudul *Security: A New Framework For Analysis* (1998). Disampaikan di dalam buku tersebut bahwa sekuritisasi adalah sebuah langkah yang membawa politik di luar aturan main yang sudah ada dan membingkai isu tersebut sebagai jenis politik khusus atau di atas politik (Buzan, Wæver & Wilde, 1998).

Sebuah isu yang disekuritisasi berarti isu tersebut ditampilkan atau dibingkai sebagai sebuah ancaman eksistensial, sehingga membutuhkan tindakan darurat dan pembenaran tindakan di luar batas-batas normal prosedur politik. Isu-isu tersebut dianggap sebagai masalah keamanan yang ekstrim dan harus segera ditangani karena diberi label 'berbahaya', 'mengancam', 'mengkhawatirkan', dan seterusnya oleh para aktor sekuritisasi. Pada dasarnya isu tersebut tidak mengancam karena tidak adanya ancaman nyata yang dirasakan, namun dengan menyebutnya sebagai isu keamanan, maka isu tersebut menjadi masalah keamanan yang penting dan disajikan sebagai sebuah ancaman (Buzan, Wæver & Wilde, 1998; Eroukhmanoff, 2018).

Proses sekuritisasi dimulai dengan pembentukan isu atau wacana yang dihadirkan sebagai suatu ancaman eksistensial terhadap objek referen—sesuatu yang dianggap terancam secara eksistensial dan memiliki klaim yang sah atas kelangsungan hidup—dimana hal ini disebut dengan langkah sekuritisasi. Proses tersebut menjadi sempurna dan ditandai sebagai sebuah keberhasilan sekuritisasi apabila audiens atau mayoritas orang menerima isu sebagai ancaman eksistensial terhadap nilai yang dianut bersama, sehingga mengakibatkan perlu adanya tindakan darurat atau langkah-langkah politik yang substansial. Sebaliknya, jika mayoritas orang menolak tindakan aktor yang melakukan sekuritisasi, maka hal tersebut hanya mewakili langkah sekuritisasi dan sekuritisasi telah gagal. Ancaman eksistensial ini kemudian dapat melegitimasi pelanggaran peraturan yang bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Hal ini dikarenakan dalam situasi sekuritisasi, aktor atau unit tidak bergantung pada aturan-aturan yang dibagikan secara intersubjektif di antara aktor tersebut, melainkan bergantung pada urgensi terhadap hak untuk mengatur tindakan-tindakannya berdasarkan prioritasnya sendiri (Buzan, Wæver & Wilde, 1998; Buzan & Hansen, 2009; Eroukhmanoff, 2018).

Aktor sekuritisasi merupakan aktor yang melakukan sekuritisasi isu dengan menyatakan sesuatu sebagai objek referen. Aktor-aktor sekuritisasi sendiri tidak terbatas pada politisi, melainkan juga berlaku pada para ahli keamanan seperti, polisi, badan

intelijen, bea cukai, dinas imigrasi, penjaga perbatasan, dan militer. Selain itu, adapula aktor fungsional yang dapat mempengaruhi dinamika bidang keamanan tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan suatu isu di atas politik. Aktor fungsional ini memiliki peran penting, karena berfungsi untuk membantu membingkai alur cerita tentang sifat eksistensial yang mengancam dari suatu isu. Contoh aktor fungsional ini dapat berupa media, akademisi, lembaga non-pemerintah, para pemikir, serta individu-individu itu sendiri melalui penyebaran cerita di lingkup teman, keluarga, dan kolega (Buzan & Hansen, 2009; Eroukhmanoff, 2018).

Ciri khas dari sekuritisasi adalah struktur retorika yang spesifik, sebuah isu akan didramatisir dan disajikan sebagai sebuah isu dengan prioritas tertinggi karena dilabeli sebagai keamanan. Sehingga, tidak menilai atau mempertimbangkan adanya ancaman objektif yang benar-benar nyata membahayakan suatu objek yang akan dipertahankan, namun mengkonstruksikan tentang apa yang harus dipertimbangkan dan ditanggapi secara kolektif sebagai ancaman melalui bahasa. Retorika yang digunakan identik dengan kata atau kalimat seperti, 'bertahan hidup', 'prioritas tindakan karena apabila masalah tersebut tidak ditangani sekarang juga maka akan terlambat', retorika tersebut akan membingkai suatu isu dan berusaha meyakinkan khalayak, sehingga kata-kata tidak hanya menggambarkan realitas, namun juga membentuk realitas yang selanjutnya memicu respon tertentu (Buzan, Wæver & Wilde, 1998; Eroukhmanoff, 2018).

Dengan demikian, sekuritisasi yang berhasil menurut Buzan memiliki tiga komponen atau langkah, yakni adanya ancaman eksistensial, tindakan darurat, dan dampak terhadap hubungan antar aktor dengan membebaskan diri dari adanya aturan (Buzan, Wæver & Wilde, 1998). Teori sekuritisasi ini kemudian dinilai mampu menjelaskan kondisi Swedia pasca agresi militer Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, dimana Swedia berusaha untuk mengkonstruksikan Rusia sebagai sebuah ancaman eksistensial dan memilih untuk meninggalkan prinsip netralitas militernya demi bergabung dengan NATO sebagai sebuah tindakan darurat yang harus dilakukan.

Negosiasi Integratif

Secara etimologi, istilah negosiasi diartikan sebagai kegiatan damai, berdasarkan pencarian dan kompromi yang menguntungkan di antara kepentingan-kepentingan yang terhormat. Sifat dasar dari negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan terbesar yang saling memuaskan, setiap pihak mendapatkan kesepakatan terbaik dan pihak lain setidaknya cukup untuk membuatnya ingin mempertahankan kesepakatan tersebut, sehingga negosiasi bukanlah tentang menang dan kalah. Keberhasilan dari negosiasi harus dilihat dan dievaluasi berdasarkan topik permasalahannya (Mautner-Markhof, 1989). Negosiasi integratif sendiri merupakan strategi negosiasi dimana para pihak akan mengeksplorasi opsi-opsi yang ada sehingga kepentingan bersama dapat tercapai. Negosiasi ini menitikberatkan pada usaha bersama dalam penyelesaian suatu masalah. Oleh sebab itu, tujuan negosiasi integratif berupa *win-win solution* yang berarti kedua belah pihak diuntungkan (Alexandra & Mujiono, 2019; Benetti, Ogliastri, & Caputo, 2021).

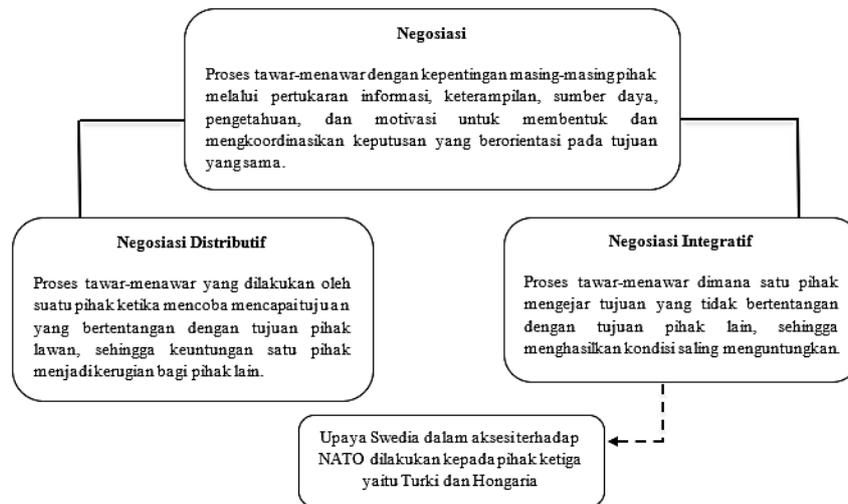
Model negosiasi ini terdiri dari tiga langkah, antara lain (Burchill, 1999):

- a. Mengidentifikasi masalah melalui penjelasan lebih lanjut dan menyeluruh.
- b. Mencari solusi alternatif dan konsekuensinya dengan diskusi dan negosiasi yang panjang.

- c. Menempatkan solusi ke dalam urutan preferensi dan memilih tindakan melalui opsi dan alternatif pilihan yang terbaik.

Ketiga langkah tersebut memerlukan pertukaran informasi yang maksimal dan komunikasi yang interaktif oleh setiap pihak. Saling percaya menjadi kondisi yang diinginkan dan diwujudkan dalam model negosiasi integratif. Konsep negosiasi integratif ini kemudian berkesesuaian dengan upaya yang dilakukan oleh Swedia sejauh ini untuk bergabung ke dalam NATO. Keengganan Turki dan Hongaria untuk meratifikasi proposal akses Swedia ditangani dengan cara negosiasi integratif, melalui pertukaran kepentingan di antara kedua negara tersebut sehingga tercapai *win-win solution*.

Model Analisa Sederhana



Sumber: Mautner-Markhof (1989) *Processes of International Negotiations*; Burchill (1999) Walton and McKersie, *A Behavioral Theory of Labor Negotiations* (1965).

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang mendeskripsikan upaya apa saja yang dilakukan oleh Swedia untuk dapat bergabung ke dalam NATO. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini berupa jenis data primer yang dapat diperoleh oleh penulis secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara, observasi, catatan lapangan, dan penggunaan dokumen resmi, kemudia data sekunder yang diperoleh oleh penulis secara tidak langsung melalui laporan atau penelitian orang lain, baik berupa buku, dokumen, jurnal, foto maupun statistik yang dapat memberikan informasi guna menunjang penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan (*library research*), serta teknik analisis data kualitatif dimana data yang dijelaskan berwujud kumpulan kata-kata atau kalimat sehingga tidak melibatkan atau menggunakan analisis data berbentuk angka.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Upaya Swedia Bergabung dengan NATO

Pasca serangan Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022, Swedia telah menghadapi masalah keamanan baru yakni pergeseran ancaman keamanan terhadap Rusia. Pada 16 Maret 2022, Magdalena Andersson Perdana Menteri Swedia menyampaikan pernyataan kepada *Sveriges Television* (SVT)—stasiun televisi

pemerintah Swedia— bahwa kondisi keamanan yang telah berubah memerlukan analisis yang beralasan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang terbuka bagi Swedia dan ancaman serta risiko yang terlibat, agar dapat mengambil keputusan yang terbaik bagi Swedia kedepannya. Oleh sebab itu, Andersson memerintahkan parlemen nya untuk mengkaji kondisi lingkungan keamanan Eropa dan di sekitar Swedia (The Local, 2022) Pernyataan Andersson tersebut menandai dimulainya langkah awal dari proses sekuritisasi Swedia terhadap Rusia.

Adanya kekhawatiran mengenai dampak perang di Ukraina tidak hanya dirasakan oleh pihak pemerintah, namun juga oleh mayoritas masyarakat Swedia. Terdapat survei yang dilakukan oleh Ipsos—sebuah grup riset global yang menghasilkan informasi dan data akurat terkait masyarakat, pasar, dan manusia—pada April 2022 mengenai respon dunia global terhadap perang di Ukraina. Hasil survei di Swedia menyatakan sebanyak 75% masyarakat Swedia percaya bahwa perang di Ukraina mampu menimbulkan risiko signifikan bagi Swedia kedepannya (Ipsos, 2022). Hal ini dikarenakan, banyaknya pemberitaan dari media Swedia maupun internasional mengenai kondisi keamanan Swedia yang telah berubah dan Rusia sebagai sebuah ancaman bagi Swedia dan lingkungan sekitarnya, sehingga perlu adanya kebijakan keamanan yang menyesuaikan.

Seperti halnya berita dari Omni Swedia pada 10 Maret 2022, dimana dalam berita tersebut disampaikan hasil wawancara dengan Michael Claesson, Manajer Operasi Angkatan Bersenjata Swedia bahwa 'Ancaman terhadap Swedia telah meningkat sejak beberapa minggu Rusia menyerang Ukraina. Salah satu dari beberapa faktor yang mengkhawatirkan adalah kerja sama antara Belarus dengan Rusia dalam invasi tersebut' ungkap Claesson (Omni, 2022). Lalu berita yang terbitkan oleh Al Jazeera pada 13 April 2022 mengenai pernyataan Magdalena Andersson bahwa 'Lanskap keamanan telah berubah total di antara sebelum 24 Februari dan setelahnya. Mengingat situasinya, kita harus benar-benar memikirkan apa yang terbaik bagi Swedia dalam situasi baru ini' (Al Jazeera, 2022). Media-media berita yang dipublikasikan dan disebarluaskan ini merupakan wujud dari aktor fungsional dalam proses sekuritisasi yang memiliki peran penting dalam hal membantu membingkai alur cerita terhadap khalayak atau masyarakat luas mengenai sifat eksistensial Rusia sebagai sebuah ancaman bagi Swedia.

Kemudian menyusul pernyataan Andersson pada Maret 2022 mengenai perlu adanya analisis keamanan Swedia yang diperbaharui, maka dihasilkan lah laporan diskusi kebijakan keamanan yakni *Report: Deterioration of the security for Sweden* yang rilis pada 13 Mei 2022. Dalam laporan tersebut disampaikan bahwa telah terjadi perubahan persepsi ancaman oleh Swedia kepada Rusia pasca serangan bersenjata yang terjadi di Ukraina, dimana Swedia memandang Rusia kini sebagai negara yang agresif dan brutal dan kondisi tersebut menjadi masalah keamanan serius bagi Swedia (*Government Offices of Sweden, 2022*). Hal ini dikarenakan, meskipun secara nyata Rusia tidak memberikan ancaman atau serangan bersenjata hingga kini, namun realitas atau kondisi baru mengenai keamanan Swedia telah terbentuk bahwa Rusia adalah sebuah ancaman eksistensial. Seperti halnya, mengenai faktor geostrategis di antara Swedia dan Rusia melalui wilayah Laut Baltik. Meskipun Rusia dan Swedia tidak berbagi wilayah perbatasan darat yang sama, namun kedua negara ini saling terhubung secara geopolitik oleh Laut Baltik, sehingga ketika kehadiran militer Rusia meningkat di sekitar lingkungan Swedia, seperti di wilayah Laut Baltik dan Belarus, maka akan tercipta implikasi keamanan berupa kerentanan wilayah Gotland yang meningkat. Hal ini

dikarenakan sumber daya militer oleh Rusia tersebut dinilai dapat digunakan untuk mencapai tujuan politik di Swedia dan lingkungan terdekat Swedia, sehingga perlu adanya cara untuk memastikan Swedia aman dan terhindar dari Rusia sebagai sebuah ancaman (*Government Offices of Sweden, 2022; The Defence Commission's Secretariat, 2023*).

Berdasarkan laporan keamanan yang dikeluarkan oleh parlemen Swedia juga disampaikan bahwa keanggotaan Swedia di NATO akan memberikan keuntungan dan memenuhi kebutuhan keamanan Swedia melalui prinsip pertahanan kolektif NATO berdasarkan Pasal 5 dari *the North Atlantic Treaty*, karena dinyatakan dalam Pasal 5 bahwa jika Sekutu NATO menjadi korban serangan bersenjata, maka setiap anggota aliansi akan menganggap tindakan tersebut sebagai serangan bersenjata terhadap seluruh anggota, sehingga segala bentuk bantuan yang dianggap perlu untuk merespons situasi tersebut akan diberikan oleh Sekutu untuk membantu anggota aliansi yang diserang, hal tersebut merupakan suatu kewajiban dari tiap negara anggota NATO (*Government Offices of Sweden, 2022; North Atlantic Treaty Organization, 2023*). Oleh sebab itu, pemerintah Swedia secara resmi mengajukan permohonan keanggotaan Swedia ke NATO pada 18 Mei 2022, dimana hal ini menandakan bahwa Swedia telah mengubah arah kebijakannya selama ini yang sebelumnya berpegang pada prinsip netralitas untuk tidak bergabung pada aliansi militer manapun menjadi hal yang sebaliknya. Keputusan untuk bergabung dengan NATO merupakan bentuk dari proses sekuritisasi yang selanjutnya.

Akan tetapi, jalan Swedia untuk menjadi bagian dari NATO masih terdapat rintangan, hal ini dikarenakan terdapat dua negara anggota yang masih belum meratifikasi proposal aksesinya Swedia dan menyatakan penolakannya atas keanggotaan Swedia di NATO, kedua negara tersebut adalah Turki dan Hongaria. Bagi Turki sendiri, alasan penolakan Presiden Erdogan berkaitan dengan embargo senjata yang dilakukan oleh Swedia kepada Turki. Dalam konferensi pers yang diadakan pada Senin 16 Mei 2022, presiden Turki mengatakan '*we cannot say 'yes' to those who impose sanctions on Turkey. On joining NATO which is a security organization*' (Henley, 2022). Embargo senjata yang diberikan oleh Swedia ini mengacu pada sanksi yang diberikan pada tahun 2019 kepada Turki sebagai akibat dari operasi militer di Irak dan Suriah (Orbaiceta, 2022). Pada konferensi pers tersebut, Erdogan juga menyampaikan alasan lain mengenai penolakan Turki, yang mana berkaitan dengan kelompok Kurdi atau Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan Organisasi Teroris Fetullah (FETO) yang dicap sebagai kelompok teroris oleh Turki. Erdogan mengatakan bahwa NATO akan menjadi tempat lahirnya teroris jika membiarkan Swedia bergabung dalam aliansi militer (Henley, 2022). Selain itu, adanya protes dan pembakaran Al-Qur'an di dekat kedutaan Turki, Stockholm pada hari Sabtu (21/01/23) oleh Rasmus Paludan—pemimpin partai politik sayap kanan garis keras Denmark—semakin menyulitkan Swedia untuk mendapatkan persetujuan Turki. Recep Erdogan Presiden Turki pada Senin (23/01/23) mengatakan bahwa Swedia tidak seharusnya mengharapkan dukungan Turki terkait keanggotaan NATO setelah apa yang terjadi pada Sabtu lalu (Reuters, 2023).

Di sisi lain, Hongaria juga memiliki alasannya sendiri dibalik penolakan yang ada yaitu adanya keluhan dan keraguan dari kelompok parlemen Fidesz dan Partai Rakyat Demokratik Kristen (KDNP) terhadap Swedia, kedua kelompok parlemen ini percaya bahwa Swedia menyebarkan kekhawatiran tidak berdasar terkait kondisi demokrasi di Hongaria dan terus memberikan kritik terhadap kebijakan Perdana Menteri

Hongaria Viktor Orban terkait hak asasi manusia, supremasi hukum, dan demokrasi di Hongaria (Brader, 2023; Murati, Rexhepi & Sahiti, 2022).

Kritik negatif oleh politisi Swedia yang dinilai sebagai kebohongan publik oleh pemerintah Hongaria adalah seperti kritik dari Jessica Roswall Menteri Swedia untuk Uni Eropa melalui akun Twiternya pada 30 Juni 2021 yang mengatakan bahwa ‘Uni Eropa sekarang harus mengambil tindakan yang jelas dan mekanisme persyaratan yang baru harus menghentikan pembiayaan ke Hongaria’. Kemudian semakin diperburuk dengan unggahan Facebook pada Mei 2022 oleh Johan Pehrson pemimpin Partai Liberal Swedia, yang mengatakan ‘Pemerintahan xenophobia dan nasionalis Hongaria terus melanggar prinsip supremasi hukum dan goyah dalam mendukung Ukraina’ (Aktuellt I Politiken, 2023). Oleh karena adanya penolakan dari kedua negara anggota NATO tersebut, mengakibatkan proses aksesinya Swedia ke NATO menjadi terhambat pada tahap ratifikasi proposal aksesinya, sehingga Swedia harus berupaya dengan sedemikian rupa agar kedua negara dapat merubah keputusannya.

Upaya Swedia Bergabung dengan NATO pasca Penolakan Turki dan Hongaria

Upaya-upaya Swedia dapat dilihat dari perspektif negosiasi integratif menurut Burchill (1999) melalui tiga tahapan dari model negosiasi integratif, yakni identifikasi masalah melalui diskusi menyeluruh, mencari solusi alternatif beserta konsekuensinya, dan penempatan solusi ke dalam urutan preferensi sehingga tindakan diambil melalui opsi dan alternatif pilihan yang terbaik. Ketiga langkah tersebut dilakukan dalam pengawasan oleh para pihak, sehingga perlu adanya pertukaran informasi yang maksimal dan komunikasi yang interaktif di antara Swedia, Turki, dan Hongaria.

Upaya Swedia Terhadap Turki

Setelah mendengar penolakan Turki atas keanggotaannya di NATO, Swedia secara cepat mengambil tindakan untuk mengatasi hal tersebut. Upaya pertama yang dilakukan oleh Swedia adalah dengan diadakannya pertemuan bagi kedua belah pihak pada 28 Juni 2022 ketika KTT NATO dilaksanakan di Madrid, Spanyol. Sebelum pertemuan KTT dimulai, Presiden Turki Recep Erdogan, Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson, dan Presiden Finlandia Sauli Niinisto mengadakan pembicaraan mengenai permasalahan apa yang menyebabkan Turki menolak untuk melanjutkan proses ratifikasi Swedia ke NATO. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg. Dalam pertemuan tersebut setelah disampaikan dan diidentifikasi permasalahan yang ada, ketiga belah pihak berusaha mencari solusi yang sekiranya bisa mengatasi permasalahan dan memenuhi kepentingan di antara Swedia, Turki, dan Finlandia. Maka dihasilkanlah kesepakatan *Trilateral Memorandum* yang berisikan komitmen Swedia, Turki, dan Finlandia untuk memberikan dukungan penuh atas ancaman keamanan nasional satu sama lain, serta sebagai bentuk dukungan Turki terhadap keanggotaan Swedia di NATO (Turdef, 2022).

Setelah *Trilateral Memorandum* disepakati dan ditanda tangani pada Juni 2022, ketiga negara mengadakan pertemuan *Permanent Joint Mechanism* sebagai bentuk pengawasan dari implementasi perjanjian trilateral oleh para pihak. Pertemuan tersebut diadakan sebanyak empat kali dimana pertemuan pertama diadakan di Konigstedt Manor, Vantaa, Finlandia pada 26 Agustus 2022. Pertemuan kedua dilaksanakan pada 25 November 2022 di Stockholm, Swedia. Kemudian pada 9 Maret 2023 diadakan kembali pertemuan yang ketiga di Brussels, sedangkan pertemuan yang keempat diagendakan di Turki pada 14 Juni 2023.

Adapun upaya-upaya konkret yang telah dilakukan Swedia terhadap Turki dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan *Trilateral Memorandum*, terdapat tiga upaya penting yang harus dilakukan oleh Swedia, antara lain pencabutan embargo senjata, ekstradisi atau deportasi orang-orang yang dianggap berbahaya oleh Turki, dan pembaharuan undang-undang kontra-terorisme, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pencabutan sanksi embargo senjata

Upaya pertama yang dilakukan oleh Swedia berdasarkan perjanjian trilateral terhadap Turki adalah pencabutan sanksi ekspor senjata, dikarenakan salah satu alasan keberatan Turki atas keanggotaan Swedia di NATO adalah perihal embargo senjata yang ditetapkan Swedia kepada Turki sejak 2019 lalu, sehingga Inspektorat Produk Strategis (ISP) Swedia—otoritas administratif yang bekerja terhadap badan pertahanan serta menangani kasus-kasus mengenai sanksi yang ditargetkan di Swedia—akhirnya mengumumkan pencabutan larangan ekspor senjata ke Turki pada 30 September 2022. Izin ekspor pada kuartal ketiga kepada Turki juga sudah diberikan, namun ISP tidak mengungkapkan perusahaan atau produk apa yang telah diberikan izin dengan alasan keamanan dan kerahasiaan (Reuters, 2023).

b. Ekstradisi atau deportasi warga Turki yang dianggap berbahaya

Ekstradisi atau deportasi warga Turki menjadi salah satu syarat dari Turki kepada Swedia untuk disetujuinya keanggotaan Swedia di NATO. Dalam pengimplementasian memorandum trilateral, Swedia pada tanggal 8 Desember 2022 telah mendeportasi seorang pria Kurdi bernama Mahmut Tat yang diduga memiliki hubungan dengan kelompok PKK dan mencari suaka di Swedia pada tahun 2015 setelah divonis hukuman selama enam tahun 10 bulan di Turki. Akan tetapi, permohonan suakanya pun berakhir ditolak oleh Badan Migrasi Swedia sehingga Mahmut Tat harus dideportasi kembali ke Turki (Reuters, 2022). Tindakan Swedia ini kemudian dipandang sebagai kemajuan dalam proses penerimaan akses Swedia ke NATO oleh Turki (The Hindu, 2022).

Selain itu, Mahkamah Agung Swedia juga menyetujui ekstradisi salah seorang pendukung PKK pada 30 Mei 2023. Proses ini berlanjut hingga 12 Juni 2023, dimana pemerintah Swedia secara resmi menyetujui untuk mengesktradisi Mehmet Kokulu seorang pria berkewarganegaraan Turki atas tuduhan pelanggaran narkoba. Kokulu juga diidentifikasi berafiliasi dengan Partai Demokratik Rakyat (HDP) pro-Kurdi, serta menjadi pendukung dari kelompok teroris PKK (MacDonald, 2023).

c. Pembaharuan undang-undang kontra-terorisme

Pada Maret 2023, pemerintah Swedia mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) anti-teror baru ke Riksdag yang diyakini akan memperkuat undang-undang kontra-terorisme yang telah ada sebelumnya. Isi dari rancangan undang-undang ini disesuaikan dengan poin-poin yang tertera dalam *Trilateral Memorandum* dan diperkirakan akan berdampak pada kegiatan-kegiatan yang mendukung kelompok PKK, YPG/PYD sejalan dengan tuntutan Turki terhadap Swedia (iGlobeNews, 2023). Melalui RUU ini, siapa pun yang berpartisipasi dalam kegiatan teroris dengan cara apapun yang dapat memajukan, memperkuat, atau mendukung organisasi tersebut akan dinyatakan bersalah dan mendapat hukum pidana. Kemudian, diatur pula larangan tentang tindakan mendanai organisasi teroris, melakukan provokasi atau merekrut orang di depan umum, serta melakukan perjalanan keluar negeri

dengan tujuan melakukan pelanggaran tersebut. Dengan demikian, RUU ini bertujuan untuk mengkriminalisasi siapa pun yang berpartisipasi dalam sebuah organisasi teroris, sehingga akan dikenakan ketentuan pidana khusus (*Government Offices of Sweden, 2023*).

Rancangan undang-undang kontra-terorisme akan efektif mulai berlaku sejak 1 Juni 2023, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tobias Billstrom Menteri Luar Negeri Swedia. Billstrom juga menyampaikan bahwa adanya RUU ini diharapkan mampu meredakan kekhawatiran Turki atas permasalahan keamanan nasional mereka dan membuka jalan Swedia untuk keanggotaan NATO (*Altuntas, 2023*). Undang-undang anti-teror yang baru disahkan tersebut akhirnya digunakan pada Juli 2023 oleh Pengadilan Distrik Stockholm untuk memvonis seorang pria Turki yakni Yahya Gungor atas dakwaan telah membantu pendanaan kelompok PKK. Gungor bersalah atas kejahatan bersenjata, percobaan pemerasan, dan percobaan pendanaan terorisme. Setelah menjalani hukumannya di Swedia, Gungor juga akan dideportasi dari Swedia dan diserahkan kepada pemerintah Turki (*Reuters, 2023*).

Ketiga upaya yang dikelompokkan berdasarkan *Trilateral Memorandum* tersebut terus dilakukan oleh Swedia demi memenuhi tuntutan Turki agar Swedia bisa bergabung ke dalam NATO, hingga akhirnya ketika pertemuan di antara Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson dan Presiden Turki Erdogan kembali dilaksanakan pada 10 Juli 2023 di Lithuania menghasilkan persetujuan dari Presiden Erdogan untuk mengirimkan proposal aksesinya Swedia ke NATO kepada parlemen Turki sesegera mungkin (*VOA, 2023*). Menyusul persetujuan Erdogan pada Juli mengenai ratifikasi aksesinya Swedia ke NATO, pada 23 Oktober 2023 proposal aksesinya Swedia akhirnya ditanda tangani oleh Presiden Turki Erdogan kemudian diserahkan kepada Majelis Agung Nasional Turki untuk diproses. Selanjutnya Komisi Urusan Luar Negeri Turki harus menyetujui terlebih dahulu rancangan undang-undang aksesinya Swedia ke NATO, lalu sesudah itu bisa dilanjutkan dengan pemungutan suara tentang ratifikasi Swedia oleh parlemen Turki. Ketika semua tahap tersebut selesai, maka tersisa proses penanda tanganan oleh Presiden Turki Erdogan terhadap rancangan undang-undang aksesinya Swedia ke NATO yang berarti bahwa proses ratifikasi Swedia oleh pemerintah Turki telah selesai. Namun, pihak Turki sendiri masih belum bisa memastikan dan memberikan waktu yang jelas terkait kapan rancangan undang-undang tersebut bisa disetujui dan dilakukan pemungutan suara oleh parlemen Turki (*Reuters, 2023*). Dengan demikian, adanya persetujuan dan penyerahan rancangan undang-undang kepada Majelis Agung Nasional yang dilakukan oleh Presiden Turki Erdogan membuat Swedia dapat melanjutkan proses aksesinya ke dalam aliansi militer NATO.

Upaya Swedia Terhadap Hongaria

Alasan Hongaria menghalangi proses bergabungnya Swedia ke NATO adalah karena keraguan mayoritas anggota parlemen Hongaria terhadap pemerintah Swedia. Mereka percaya bahwa Swedia telah menyebarkan kekhawatiran tidak berdasar terkait kondisi demokrasi di Hongaria dan terus memberikan kritik terhadap kebijakan Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban. Oleh sebab itu, diadakan lah pertemuan antara Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billstrom dengan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hongaria Peter Szijjarto di Stockholm pada hari Senin 6 Maret 2023. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mengklarifikasi tuduhan Swedia terkait keadaan demokrasi di Hongaria, serta membahas rencana ratifikasi Hongaria atas proposal aksesinya Swedia ke

NATO (Brader, 2023). Dalam pertemuan tersebut, Szijjarto menyampaikan bahwa tuduhan yang dilayangkan kepada Hongaria merupakan kebohongan yang didasarkan pada prasangka. Pihak Swedia sendiri merespon hal tersebut dengan baik melalui diskusi yang jujur, Swedia juga berjanji untuk melakukan mediasi demi memastikan pertukaran kepentingan di antara kedua negara dapat berjalan dengan lancar dan terjadi sesegera mungkin (Brader, 2023). Pada saat pertemuan berlangsung delegasi Hongaria juga tidak mengajukan persyaratan apapun terhadap permasalahan ratifikasi, berdasarkan keterangan dari Ketua Komite Urusan Luar Negeri Swedia Aron Emilsson yang turut hadir pada hari itu (Olsen, 2023).

Pertemuan di antara Swedia dan Hongaria kembali dilanjutkan pada hari berikutnya, Selasa 7 Maret 2023. Delegasi Hongaria diwakili oleh Wakil Ketua Majelis Nasional Csaba Hende diterima oleh Andreas Norlen Ketua Parlemen Swedia di Riksdag. Permasalahan ratifikasi Swedia dibahas kembali dalam pertemuan kali ini, Norlen menyampaikan pertemuan yang terjadi berlangsung baik dan konstruktif (*Sveriges Riksdag*, 2023). Delegasi Hongaria Hende setelah pertemuan selesai dilangsungkan, mengatakan bahwa pemerintah Hongaria, presiden Hongaria, perdana menteri, dan sebagian besar anggota parlemen Hongaria jelas mendukung keanggotaan Swedia di NATO, sehingga diperkirakan pemungutan suara terkait ratifikasi Swedia akan berlangsung pada 20 Maret 2023 (SVT Nyheter, 2023). Ungkapan yang disampaikan oleh Hende tersebut tentu menjadi pertanda baik bagi Swedia menuju keanggotaan NATO. Akan tetapi, berdasarkan perintah dari Wakil Perdana Menteri Hongaria Zsolt Semjen, pemungutan suara yang dijadwalkan pada 20 Maret harus ditunda hingga seminggu kemudian dengan alasan Hongaria masih menjalankan proses negosiasi dengan pihak Uni Eropa mengenai dugaan pelanggaran persyaratan supremasi hukum di Hongaria (APNews, 2023). Sayangnya, penundaan ini terus saja berlanjut hingga bulan berikutnya tanpa ada kepastian yang jelas bagi Swedia.

Menteri Luar Negeri Hongaria sempat memberikan penjelasan terkait penundaan tersebut, dikatakan bahwa pemerintah Hongaria mendukung keanggotaan Swedia di NATO, tetapi keputusan akhir berada pada parlemen yang masih meragukan Swedia dan mempertimbangkan penghinaan serta tuduhan yang dilayangkan Swedia selama ini kepada Hongaria, mengakibatkan pemungutan suara bagi Swedia masih tertunda (YeniSafak, 2023). Penundaan yang disampaikan oleh pihak Hongaria tersebut membuat Swedia bertindak. Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson menemui Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban di sela-sela KTT Uni Eropa di Brussels pada 29 Juni 2023 dengan maksud menanyakan terkait penundaan ratifikasi Swedia ke NATO, Kristersson menyampaikan bahwa hasil pertemuan tersebut adalah Orban yang mengatakan masih dengan komitmennya untuk mendukung dan sesegera mungkin meratifikasi proposal aksesinya Swedia dan tidak menundanya (Reuters, 2023). Namun, setelah itu tidak ada waktu yang jelas kembali terkait kapan Hongaria akan segera melakukan pemungutan suara untuk Swedia dan meratifikasi proposal aksesinya. Pihak Hongaria kemudian kembali menyatakan bahwa Hongaria tetap akan mendukung dan menepati janjinya untuk tidak menghalangi negara mana pun dalam hal keanggotaan NATO, meskipun Turki merubah sikapnya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Peter Szijjarto pada konferensi pers di Budapest pada awal Juli 2023 (Gyori, 2023).

Kabar dan pernyataan yang berulang kali disampaikan oleh pihak Hongaria akhirnya mendapati kejelasan pada 11 Juli 2023, sehari setelah Turki mengumumkan kesiapannya untuk meratifikasi proposal aksesinya Swedia ke NATO. Disampaikan oleh

Menteri Luar Negeri Peter Szijjarto melalui akun *Facebook* nya bahwa posisi Hongaria jelas dimana pemerintah Hongaria mendukung akses Swedia ke NATO, dan penyelesaian proses ratifikasi hanya tinggal persoalan teknis (Euronews, 2023). Selain itu, Ketua Komite Urusan Luar Negeri parlemen Hongaria juga menyampaikan kepada stasiun televisi swasta Hongaria InfoRadio bahwa proses ratifikasi Swedia akan dikerjakan pada waktu musim gugur atau pertengahan September (Reuters, 2023). Pernyataan tersebut memberi petunjuk bahwa langkah Swedia untuk menjadi bagian dari NATO dapat dilanjutkan, sehingga Swedia diharapkan akan segera menjadi anggota ke-32 dari aliansi militer NATO.

Upaya yang telah dilakukan oleh Swedia terhadap Hongaria maupun Turki memberikan hasil yang diinginkan oleh Swedia selama ini, yakni keberhasilan Swedia menjadi anggota formal dari aliansi militer NATO sejak 7 Maret 2024. Adapun keberhasilan tersebut diterima Swedia beberapa bulan setelah persetujuan dan penyerahan rancangan undang-undang oleh Presiden Erdogan kepada Majelis Nasionalnya, yang selanjutnya melaksanakan finalisasi proses ratifikasi Swedia pada 25 Januari 2024. Kemudian disusul oleh persetujuan parlemen Hongaria terhadap proposal akses Swedia pada 26 Februari 2024, sehingga kini Swedia telah resmi menjadi anggota ke-32 dari *The North Atlantic Treaty Organization*.

Kesimpulan

Agresi militer yang dilancarkan oleh Rusia kepada Ukraina pada Februari 2022 nyatanya membuat pergeseran ancaman yang besar oleh Swedia terhadap Rusia. Swedia menganggap bahwa Rusia telah menjadi ancaman yang sangat berbahaya, karena telah bersikap agresif dan totaliter. Selain itu, Swedia juga melihat bahwa hubungan kerja sama yang telah dijalani selama ini bersama NATO tidak dapat menjamin kepentingan keamanan nasionalnya, hal ini dikarenakan Swedia bukan negara anggota NATO dan menurut Pasal 5 dari *the North Atlantic Treaty*, prinsip pertahanan keamanan kolektif hanya berlaku bagi sekutu NATO. Oleh sebab itu, demi mendapatkan jaminan keamanan melalui prinsip pertahanan kolektif oleh NATO, Swedia harus bergabung ke dalam pakta pertahanan tersebut.

Swedia secara resmi mengajukan permohonan keanggotaan NATO pada 18 Mei 2022, akan tetapi proses akses tersebut tidak berjalan dengan lancar. Hal ini dikarenakan terdapat dua negara anggota NATO yang menolak akses Swedia ke NATO, yakni Turki dan Hongaria. Maka dari itu demi kelancaran proses akses, Swedia melakukan berbagai upaya kepada Turki dan Hongaria agar kedua negara dapat merubah keputusannya, seperti melakukan kesepakatan *Trilateral Agreement* dan mengadakan pertemuan serta mediasi. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Swedia terhadap Turki dan Hongaria pada akhirnya membuahkan hasil, Turki sepakat untuk melanjutkan proses ratifikasi Swedia ke parlemen begitu pula dengan Hongaria. Swedia pada akhirnya dapat melanjutkan proses akses dan berhasil menjadi anggota ke-32 dari *The North Atlantic Treaty Organization* sejak 7 Maret 2024.

Daftar Pustaka

- Aktuellt I Politiken. 2023. *Ministrarnas uttalanden som retar Ungern*. Tersedia di: <https://aip.nu/ministrarnas-uttalanden-som-retar-ungern/>
- Al Jazeera. 2022. *Finland, Sweden veer closer to NATO in historic policy shift*. Tersedia di: <https://www.aljazeera.com/news/2022/4/13/finland-sweden-veer-closer-to-nato-in-historic-policy-shift>
- Alexandra, F., & Mujiono, D. I. K. 2019. *Pengantar Diplomasi: Sejarah, Teori dan Studi Kasus*. Samarinda: Mulawarman University Press.
- Altuntas, A. 2023. *New anti-terrorism law comes into forced in Sweden*. Tersedia di: <https://www.aa.com.tr/en/europe/new-anti-terrorism-law-comes-into-force-in-sweden/2911944>
- APNews. 2023. *Hungary to delay vote on NATO membership for Sweden, Finland*. Tersedia di: <https://apnews.com/article/hungary-delays-sweden-finland-nato-vote-86762305691b97ed387828451d4b44d1>
- Benetti, S., Ogliastri, E., & Caputo, A. 2022. "Distributive/integrative negotiation strategies in cross-cultural contexts: a comparative study of the USA and Italy", *Journal of Management & Organization*, 27, pp. 786-808. Tersedia di: <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-management-and-organization/article/distributiveintegrative-negotiation-strategies-in-crosscultural-contexts-a-comparative-study-of-the-usa-and-italy/A68B54F9B1710461A642DC719C34F917>
- Brader, A. 2023. *Hungarian Delegation to Meet with Nordic Leaders to Discuss NATO Bid*. Tersedia di: https://www.hungarianconservative.com/articles/politics/hungary_peter_szijjart_o_sweden_finland_nato_membership/
- Brader, A. 2023. *Hungarian Delegation to Meet with Nordic Leaders to Discuss NATO Bid*. Tersedia di: https://www.hungarianconservative.com/articles/politics/hungary_peter_szijjart_o_sweden_finland_nato_membership/
- Burchill, F. 1999. "Walton and McKersie, A Behavioral Theory of Labor Negotiations (1965)", *Historical Studies in Industrial Relations*, pp. 137-168.
- Buzan, B., & Hansen, L. 2009. *The Evolution of International Security Studies*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Buzan, B., Wæver, O., & Wilde, J. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. United Kingdom: Lynne Rienner Publishers, Inc.
- Eroukhmanoff, C. 2018. *Securitisation Theory: An Introduction*. Tersedia di: <https://www.e-ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/>
- Euronews. 2023. *Sweden's NATO bid: Hungary joins Turkey in lifting veto*. Tersedia di: <https://www.euronews.com/2023/07/11/hungary-signals-it-is-ready-to-join-turkey-in-approving-swedens-bid-for-nato-membership>
- Government Offices of Sweden. 2022. *Deterioration of the Security Environment – Implications for Sweden*. Tersedia di: <https://www.government.se/legal-documents/2022/05/ds-20228/>
- Government Offices of Sweden. 2023. *History of Sweden and NATO*. Tersedia di: <https://www.government.se/government-policy/sweden-in-nato/history-of-sweden-and-nato/>

- Government Offices of Sweden. 2023. *Participation in a terrorist organisation to be a punishable offence*. Tersedia di: <https://www.government.se/press-releases/2023/03/participation-in-a-terrorist-organisation-to-be-a-punishable-offence/>
- Government Offices of Sweden. 2023. *Sweden's path to NATO membership*. Tersedia di: <https://www.government.se/government-policy/sweden-in-nato/history-of-sweden-and-nato/>
- Henley, J. 2022. *Turkey says it will not approve Sweden and Finland joining NATO*. Tersedia di: <https://www.theguardian.com/world/2022/may/16/russia-finland-sweden-nato-ukraine-war>
- iGlobeNews. 2023. *Turkey's Stance on Sweden's NATO Bid: "All Politics are Local"*. Tersedia di: <https://www.iglobenews.org/turkeys-stance-on-swedens-nato-bid-all-politics-are-local/>
- Ipsos. 2022. *The World's Response to the War in Ukraine*. Tersedia di: <https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2022-04/Global%20Advisor%20-%20War%20in%20Ukraine%20-%20April%202022%20-%20Graphic%20Report.pdf>
- Jonsson, N. 2022. *Magdalena Andersson" Ett nytt och mörkt kapitel I Europas historia*. Tersedia di: <https://www.svt.se/nyheter/utrikes/magdalena-andersson-ett-nytt-och-morkt-kapitel-i-europas-historia>
- Library of Congress. 2022. *Sweden: Government Announces Intent to Apply for NATO Membership*. Tersedia di: <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2022-05-17/sweden-government-proposes-nato-membership/>
- Mautner-Markhof, F. (eds.) 1989. *Processes of International Negotiations*. United States of America: Westview Press.
- Murati, V., Rexhepi, R., & Sahati, V. 2022. "Accelerated Integration of Finland and Sweden Into NATO Due to the War in Ukraine: Possibilities and Obstacles", dalam Valon Murati et al (eds). *Internasional Conference on Social and Healthcare Studies*, Kosovo: Universum Press, pp. 141-149. Tersedia di: https://www.researchgate.net/profile/Nijazi-Halili/publication/372316030_Punimi_shkenor_ne_Kolegjin_Universum_Prish_tin_ProfNijazi_Halili_17112022/links/654358293cc79d48c5c6ee36/Punimi-shkenor-ne-Kolegjin-Universum-Prishtin-ProfNijazi-Halili-17112022.pdf#page=141
- North Atlantic Treaty Organization. 2023. *Collective defence and Article 5*. Tersedia di: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_110496.htm
- North Atlantic Treaty Organization. 2023. *Relations with Sweden*. Tersedia di: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52535.htm
- Olsen, J.M. 2023. *Swedish lawmakers vote to endorse country joining NATO*. Tersedia di: <https://apnews.com/article/sweden-finland-nato-turkey-859b734595b8e4bfe2956604c42e1231>
- Omni. 2022. *Forsvaret-okat-hot-mot-sverige-flera-tankbara-ryska-motreaktioner*. Tersedia di: <https://omni.se/forsvaret-okat-hot-mot-sverige-flera-tankbara-ryska-motreaktioner/a/BjEVne>
- Orbaiceta, G. V. 2022. *The Turkish problem for Sweden's NATO accession*. Tersedia di: <https://www.unav.edu/web/global-affairs/the-turkish-problem-for-sweden-s-nato-accession>

- Reuters. 2023. *Hungary signals it's likely to back Sweden's NATO bid in autumn*. Tersedia di: <https://www.reuters.com/world/europe/hungary-signals-its-likely-back-swedens-nato-bid-autumn-2023-07-13/>
- Reuters. 2023. *Protests in Stockholm, including Koan-burning, draw condemnation from Turkey*. Tersedia di: <https://www.reuters.com/world/turkey-cancels-swedish-defence-minister-visit-after-protest-permit-2023-01-21/>
- Reuters. 2023. *Sweden resumes arms exports o Turkey after NATO membership bid*. Tersedia di: <https://www.reuters.com/world/europe/sweden-resumes-arms-exports-turkey-after-nato-membership-bid-2022-09-30/>
- Reuters. 2023. *Turkey's Erdogan submits Sweden's NATO bid to parliament for ratification, presidency says*. Tersedia di: <https://www.reuters.com/world/turkeys-erdogan-submits-swedens-nato-bid-parliament-ratification-presidency-2023-10-23/>
- Sveriges Riksdag. 2023. *The Speaker receives a delegation from Hungary*. Tersedia di: https://www.riksdagen.se/en/news/articles/2023/mar/7/the-speaker-receives-a-delegation-from-hungary_cms33df9e81-fe2d-45a1-95ec-3bd06989989aen/
- SVT Nyheter. 2023. *Ungersk toppolitiker: "Vi stodjer Sverige i Nato"*. Tersedia di: <https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ungersk-toppolitiker-vi-stodjer-sverige-i-nato>
- The Defence Commission's Secretariat. 2023. *The Swedish Defence Commission's report on security policy, 2023*. Tersedia di: <https://www.regeringen.se/contentassets/de808e940116476d8252160c58b78bb7/sammandrag-pa-engelska-av-allvarstid-ds-202319.pdf>
- The Hindu. 2022. *Turkey jails outlawed PKK member extradited from Sweden*. Tersedia di: <https://www.thehindu.com/news/international/turkey-jails-outlawed-pkk-member-extradited-from-sweden/article66219437.ece>
- The Local. 2022. *Swedish government firm on not joining NATO despite Russian aggression*. Tersedia di: <https://www.thelocal.se/20220224/swedish-government-firm-on-not-joining-nato-despite-russian-aggression>
- Tidningen Naringslivet. 2022. *Partier kallas till sakerhetspolitiska samtal*. Tersedia di: <https://www.tn.se/article/15145/partier-kallas-till-sakerhetspolitiska-samtal/>
- Turdef. 2022. *Trilateral Memorandum in Madrid: Everyone is Happy*. Tersedia di: <https://turdef.com/article/trilateral-memorandum-in-madrid-everyone-is-happy>
- VOA. 2023. *NATO Chief: Turkey Agrees to Send Sweden's NATO Accession Protocol to Parliament Swiftly*. Tersedia di: <https://www.voanews.com/a/nato-chief-turkey-agrees-to-send-sweden-s-nato-accession-protocol-to-parliament-swiftly-/7174988.html>
- YeniSafak. 2023. *Hongaria, Turkiye will confer 'reciprocally' on Sweden's NATO bid: Foreign Minister Szijjarto*. Tersedia di: <https://www.yenisafak.com/en/news/hungary-turkiye-will-confer-reciprocally-on-swedens-nato-bid-foreign-minister-szijjarto-3665147>